

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Baru Gerakan Sosial**

Gerakan sosial merupakan pandangan baru tentang gerakan sosial yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an, terutama di kalangan warga Eropa dan Amerika (Singh, 2001: 96). Orang-orang Eropa dan Amerika pada saat itu melihat munculnya gerakan besar pada isu-isu yang didasarkan pada aspek kemanusiaan, budaya, serta non-materialistik. Gerakan ini memiliki sejumlah nilai yang sifatnya umum serta memiliki tujuan untuk memberi perlindungan serta menjaga keadaan kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Tidak sama dengan model gerakan sosial lama (klasik serta neoklasik), model gerakan sosial baru (GSB) bebas dari wacana ideologis yang meragukan anti-kapitalisme, perjuangan kelas, serta revolusi kelas. Karena itu, gerakan sosial baru tidak memiliki ketertarikan pada ide-ide revolusioner, yang mencakup mengorganisir gerakan revolusioner yang bertujuan mengakhiri sebuah sistem pemerintahan. Akan tetapi, tujuan serta strategi gerakan sosial baru adalah untuk mengatasi masalah seperti kebangkitan pekerja industri, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi kelas, yang sedikit memiliki kemiripan dengan model gerakan sosial lama (Singh, 2010: 121-122).

GSB pada hakikatnya tak memiliki ketertarikan untuk mempersoalkan gagasan revolusi. Paradigma idealis serta arah gerakan sosial baru menekankan pada berbagai manifestasi melalui isu-isu seperti kebebasan sipil, regionalisme serta etnis, lingkungan, feminisme, menolak rasisme, melucuti senjata nuklir, dan perdamaian.

Pendekatan teoritis terkini untuk menjelaskan perubahan sifat gerakan sosial (*social movement*), teori gerakan sosial baru (*new social movement theory*), memberi penekanan

terhadap karakteristik gerakan sosial pada perkembangan masyarakat pasca-industri (pasca-industri).

Di Eropa Barat serta Amerika Utara (Melucci, 1980; McAdam, McCarthy & Zald 1988, Kriesi, 1989; Pakulski, 1993, Macionis, 1999: 621). Akar dari teori gerakan sosial baru adalah tradisi filsafat politik serta sosial di benua Eropa. Teori tersebut adalah pendekatan yang menjawab lemahnya Marxisme klasik untuk analisis perilaku kolektif (Sukmana, 2016:117). Cara pandang yang kontras dimiliki oleh sejumlah teoritis gerakan social baru mengenai logika dari perilaku yang berbasis dalam kultur, ideologi, serta politik, yang menjadi akar dari perilaku kolektif (*collective actions*), serta sumber yang lain mengenai identitas, yang mencakup, jenis kelamin, gender, serta memberikan makna terhadap identitas kolektif. Maka, GSB mempunyai terminology yang tidak sama mengenai perilaku kolektif yang mengubah asumsi dari Gerakan social lama (*old social movement*) mengenai revolusi ploterian yang dikaitkan melalui Marxisme Klasik. Meski teori Gerakan social baru (*new social movement*) adalah reaksi kritis pada Marxisme Klasik, akan tetapi sejumlah teoritis Gerakan social baru berupaya mengupdate serta melakukan revisi terhadap asumsi Marx, sedangkan teoritis yang lain melaksanakan perubahan (Sukmana, 2016:118).

Upaya klasifikasi sebuah fenomena empiris mengenai gerakan sosial, akankah dimasukkan ke kategori gerakan sosial lama atau masuk ke kategori gerakan sosial baru pada prosesnya ternyata tidak mudah. Suharko (2006: 9-12) mengutip apa yang dikemukakan oleh Pichardo dan Singh bahwa sejumlah pertimbangan serta karakteristik yang dianggap bisa menjadi pembeda antara gerakan sosial baru dari gerakan sosial lama, yaitu:

**a. Ideologi serta tujuan**

Orientasi ideologi serta isu yang gerakan sosial lama usung seperti perjuangan kelas, revolusi kelas, serta anti-kapitalisme mulai ditinggalkan oleh GSB. GSB mengalami perkembangan serta mulai tak sejalan dengan asumsi Marxian bahwasannya seluruh perjuangan harus berdasarkan konsep kelas. Lahirnya gerakan sosial baru merupakan gerakan sosial lintas kelas yang mengajukan sejumlah isu spesifik dan sifatnya non-materialistik. Dalam aksinya GSB tidaklah memakai perangkat politik tradisional dalam upaya memberi pengaruh terhadap negara, namun lebih menggantungkan diri terhadap mobilisasi massa dalam rangka upaya melakukan perubahan terhadap sikap serta nilai, seperti halnya dalam mengatur gerakan sosial lingkungan (Abercombie, Hill and Turner, 2000).

GSB bertujuan untuk mengemukakan isu pertahanan komunal serta masyarakat untuk melawan ekspansi pasar serta negara yang makin mengalami peningkatan serta sudah memasuki bermacam aspek kehidupan. Kemunculan sejumlah agen yang memperjuangkan pengawasan serta control sosial misalnya kaum aktivis sosial ataupun lingkungan, kaum anti-otoritarian, kaum anti-rasisme adalah wujud nyata dari upaya ini. GSB akan senantiasa berusaha melakukan perlawanan terhadap tatanan serta keadaan sosial yang mana pasar serta negara terlampau dominan, serta senantiasa bersuara untuk mewujudkan keadaan yang lebih bermartabat serta adil.

#### **b. Taktik serta Pengorganisasian**

GSB tak lagi berpegang pada model pengorganisasian politik kepartaian, maupun serikat buruh industry. Pilihan GSB lebih pada model pengorganisasian di luar politik normal yang mengaplikasikan strategi yang memberikan gangguan (disruptive), melakukan mobilisasi opini public demi memperoleh daya tawar politik. GSB identik terhadap wujud sejumlah aksi yang tak biasa, dramatis serta matang dalam perencanaannya, dilengkapi dengan kostum serta representasi simbolisnya. Tujuan

utamanya tentu demi melakukan mobilisasi opini publik serta diperhatikan publik secara luas.

Secara umum GSB memberikan respon terhadap berbagai isu yang sumbernya dari civil society. Kemudian, dari aspek sasaran perjuangannya, Cohen yang dikutip oleh Suharko (2006) mengatakan bahwa GSB terbatas pada empat hal, yakni : perjuangannya bukan untuk mengemablikan berbagai komunitas utopia yang tak dapat dijangkau pada masa lampau, perjuangannya demi eksistensi, keberagaman, serta otonomi, melaksanakan usaha sadar demi belajar melalui pengalaman masa lalu untuk melakukan relativisasi nilai-nilai mereka dengan nalar serta pertimbangan eksistensi formal ekonomi pasar serta negara.

#### **c. Struktur**

Struktur GSB tidaklah kaku, sifatnya mengalir, demi menghindarkan diri dari ancaman oligarki. Hal tersebut terwujud melalui keberadaan usaha merotasi kepemimpinan, melaksanakan voting bagi seluruh isu, mempunyai organisasi ad hoc yang tak permanen. GSB melahirkan struktur yang memiliki responsivitas lebih pada apa yang individu butuhkan, yang berbentuk struktur yang non-hierakis, terdesentralisasi, serta terbuka.

#### **d. Partisipan ataupun actor**

Tak sama dengan gerakan sosial lama yang kebanyakan asal partisipannya dari sebuah kelas tertentu, asal partisipan GSB dari bermacam basis sosial, misalnya pada aspek kelas, pekerjaan, pendidikan, serta gender. GSB tak cuma identic pada kelompok tertentu seperti gerakan sosial lama. Lintas perjuangan partisipan GSB menembus berbagai batas sosial untuk kepentingan public yang lebih besar.

Menurut Pichardo (1997), dominasi aktor ataupun partisipan dari GSB adalah sosok-sosok yang terdidik, seperti pada akademisi, seniman, dan berbagai agen pelayanan

kemanusiaan. Claus Offe (1985) yang dikutip oleh Suharko (2006) berpendapat bahwa partisipan gerakan sosial tak mengindetikkan dirinya kepada sejumlah basis aliran mapan, misalnya konservatif ataupun liberal. Aktor ataupun partisipan GSB asalnya dari tiga sector yakni: unsur kelas menengah lama (petani, pemilik modal), kelas menengah baru, individu yang posisinya tak terlampaui terlibat pada passer kerja, contohnya mahasiswa.

GSB merupakan gerakan yang majemuk, yang mana dasar kemajemukannya ini menjadikan GSB bisa mengusung tujuan yang beragam serta menyuarakan berbagai macam kepentingan publik. GSB tak cuma meliputi sejumlah pihak pada suatu wilayah saja, namun jangkauannya bisa mencapai wilayah yang lebih luas, baik nasional, ataupun internasional. Contohnya, sebuah GSB yang menyuaakan isu serta masalah kelestarian lingkungan kerap dapat menjangkau berbagai pihak yang luas dari sejumlah wilayah bahkan dari sejumlah negara, hal tersebut disebabkan permasalahan yang disurakan adalah permasalahan bersama yang juga masyarakat luas alami.

## **2. Media Sosial**

Menurut Nasrullah (2015), media sosial adalah media di internet di mana pengguna dapat mengekspresikan diri, berkomunikasi dengan orang lain, bertukar informasi, dan membangun ikatan sosial virtual. Setidaknya ada enam kategori utama untuk melihat popularitas media sosial, yaitu : social network atau media jejaring, blog atau jurnal online, microblog, media sharing atau media berbagi, social bookmarks atau penanda sosial, media konten bersama ataupun wiki. Mengkategorikan jenis media sosial kedalam kategori tersebut adalah salah satu upaya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan jenis media sosial.

Media sosial dianggap memiliki kemampuan untuk menghadirkan metode baru dalam melakuakn komunikasi melalui teknologi yang amat berbeda dengan media tradisional. Sejumlah alat komunikasi di dunia jaringan mewujudkan komunikasi yang kaya serta tak

terbatas ruang maupun waktu. Lalu, melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, bahkan strategi pemasaran juga mulai mengalami pergeseran ke pemasaran konten. Sejumlah peranan jejaring sosial juga dilakukan, diantaranya menyediakan konten yang menarik yang tak cuma berwujud artikel, namun juga e-book, konten audio atau podcast, video, dan lain-lain. Serta postingan pada situs resmi blog serta jejaring sosial. Apabila media sosial diarahkan pada sebuah website ataupun blog, lalu website itu meyakinkan orang-orang yang mengujungnya agar menyebarkan kontennya di jejaring sosial yang berbeda, maka yang demikian bisa menaikkan ketelihatannya. Kehadiran media sosial tak terlalu berbeda dengan pengoperasian komputer. Terjadi tiga hal, misalnya pengenalan, berkomunikasi, serta bekerja sama, dapat diibaratkan seperti cara kerja computer untuk membentuk setiap sistem. Bentuk ini merupakan kelas yang mana lapisan pertama merupakan dasar pembentukan lapisan lainnya, hakikatnya pengenalan adalah dasar komunikasi, sedangkan komunikasi adalah dasar Kerjasama. (Nasrullah, 2015). Sementara Heryanto (2019) berpendapat bahwa banyak yang tak sadar jika jejaring sosial merupakan media bertukar pesan dari satu ke banyak (*from one to many people*) bahkan dari banyak orang ke banyak orang (*many to many*). Di saat sebuah status ataupun cerita hadir di timeline akun media sosial, saat itu juga warga dunia maya (pengguna internet) dapat melakukan akses terhadapnya. Banyak yang tak mempedulikan akan kemungkinan bahwa statusnya bertentangan dengan hukum. Banyak peraturan hukum yang mungkin dilanggar, namun tak ditangani secara matang oleh kelompok-kelompok yang menanggapinya. Sering muncul beda pendapat tanpa mempedulikan etika ataupun nilai. Yang harus diperhatikan tentang pertumbuhan Internet adalah bahwasannya media sosial baru tersebut sudah berubah dari hanya media komunikasi. Web read-only (web 1.0) telah berkembang menjadi web partisipatif (era web 2.0) di mana pada dasarnya telah menjadi konten yang dibuat pengguna, atau itu berarti bahwa audiens menghasilkan konten itu

sendiri. Tak jarang, dari sinilah muncul fenomena citizen media yang notabene memiliki kemampuan untuk menarik banyak peserta. Hal tersebut kemudian dapat memberikan Internet makin memiliki perannya sendiri, peran yang agak penting serta unik pada dinamika komunikasi politik modern (Heryanto, 2019).

Andriadi (2017) berpendapat bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sudah melahirkan perkembangan dunia politik. Khususnya terkait dengan aplikasi demokrasi pada segala zaman, praktik demokrasi telah berubah seiring dengan berubahnya inovasi teknologi komunikasi dan informasi. Di era teknologi radio, politisi memanfaatkannya untuk media berkampanye. Masyarakat pun menggunakan radio untuk alat partisipasi berpolitik. Internet memupus kelemahan teknologi awal, dimana metode komunikasi satu arah berubah menjadi metode komunikasi dua arah (interaktif). Melalui teknologi digital, Internet menjadikan proses komunikasi menjadi interaktif. Keduanya dapat berbicara tatap muka, bahkan jika mereka ada di dua tempat yang berbeda. Aspek interaktivitas tersebut yang menjadikan Internet sesuai dengan demokrasi.

Dalam demokrasi, lebih banyaknya publik yang berpartisipasi, biasanya diharapkan. Jadi, misalnya, jika anggota masyarakat dalam proses politik melaksanakan partisipasinya dengan mengungkapkan aspirasi atau perilaku lain, mereka dimotivasi oleh keyakinan bahwa kepentingan mereka akan terwujud atau setidaknya menarik bagi mereka melalui perilaku kolektif ini, dan perilaku ini memengaruhi pengambilan keputusan. kekuatan fakta bahwa itu dapat mempengaruhi Artinya, mereka mempercayai jika aktivitas mereka memiliki pengaruh politik (Budiarjo, 2017). Media sosial mulai banyak dipakai pada tataran politik yang konteksnya lebih khusus. Sementara publik menggunakan media sosial untuk sarana baru dalam ekspresi partisipasi politiknya, untuk politisi sendiri, media sosial adalah sarana baru untuk menghubungkan, mewujudkan interaksi, dan menyebarkan informasi politik di antara penduduk (Andriadi, 2017). Media sosial

secara penuh memberi kebebasan pada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. (Andriadi, 2017). Ia juga menerangkan jika media sosial memberi alternatif ruang untuk masyarakat dalam mengekspresikan partisipasi politiknya. Mengenai fakta tersebut, salah satu hal yang paling relevan yaitu bahwa generasi muda yang benar-benar mewakili segmen sosial. Media sosial memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam politik nyata. Fenomena serta tanda-tanda yang menjadi saksi tumbuhnya peran strategis jejaring sosial dalam demokrasi suatu bangsa semakin kuat. Peran jejaring sosial dalam politik akan meningkat. Politisi yang gagal menyadari indikasi tersebut bisa hilang momentum bagi masa depan demokrasi Indonesia pada era digital nantinya. Mereka dapat tenggelam dalam kekonvensionalan politik, kemudian menghilang ditenggelamkan zaman. Namun apabila mampu memanfaatkan teknologi digital, yang mencakup media sosial, eksistensi politiknya bisa makin kuat, serta dapat generasi muda terima.

## **B. Kerangka pemikiran**

Kecanggihan teknologi yang terus berkembang didukung oleh internet telah menciptakan media sosial yang bisa individu gunakan dalam berbagi minat. Media sosial dapat digunakan tidak hanya sebagai sarana komunikasi di dunia maya, tetapi juga sebagai upaya untuk mengekspresikan citra diri seorang individu, salah satunya politisi. Evaluasi publik pada pos-politik seringkali menentukan kemampuan mereka yang berpartisipasi dalam politik, termasuk politik generasi muda, yang identik dengan berbagai ide kritis serta kreatif.

Ada banyak jenis Internet yang digunakan dalam praktik demokrasi contohnya media sosial serta situs web. Seluruh varian tersebut bisa dijadikan alat praktis dalam dunia politik. Contohnya dalam menyampaikan sebuah aksi di media sosial yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait 'king of lip service' yang mendadak viral. Aktivitas mahasiswa yang bergerak di media sosial atau dunia maya adalah sebuah pengalaman baru pada dua decade terakhir. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pola public

berkomunikasi di masa mendatang. Internet serta media sosial pun jadi bagian yang tidak bisa di tinggalkan dari keseharian manusia.

Kini, kehadiran media sosial serta internet merupakan media baru, yang tak cuma menyajikan konten. Mudah diaksesnya layanan media sosial lewat layar smartphone, menjadi warna dari tingkah laku masyarakat. Salah satunya memberi pengaruh pada tingkah laku Gerakan sosial mahasiswa seperti yang sudah dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di media sosial. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa media sosial telah menjadi saluran partisipasi serta mampu menciptakan sebuah opini public. Secara pintar, aktivis mahasiswa memanfaatkan fasilitas tersebut. Mereka bersuara, memberikan kritik serta pendapatnya di media sosial. Yang mana pada gerakan mahasiswa di tahun 90-an tak tak pernah terjadi.

Variasi teknologi digital dapat dijadikan sebagai sarana partisipasi baru yang sangat membantu masyarakat luas. Terdapat tiga wujud partisipasi yang bisa diproses melalui bantuan teknologi digital: partisipasi sosial, kebijakan, serta politik (Suharyanto, 2016). Misalnya, media sosial bisa dipakai untuk partisipasi politik ketika menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook.

### **Gambar 3. 1**

## Kerangka Pemikiran

